



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Temuan Penelitian

Berpijak dari paparan data di bab tiga, peneliti menemukan beberapa hal tentang komunikasi politik tentang pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013 pada partisipasi warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo:

1. Aktor politik

Komunikator politik, apakah dia politikus, profesional, atau aktivis, menggunakan pembicaraan persuasif, untuk saling mempengaruhi anggota khalayak yang kurang terlibat di dalam politik. Alat atau upaya yang digunakan untuk mengirim pesan itu ialah saluran dari “siapa mengatakan pada siapa”.

Merujuk pada rumusalan masalah pada bab pendahuluan, Siapa saja yang berperan dalam penyampaian informasi politik tentang proses sosialisasi pemilihan Gubernur Jatim tahun 2013 pada warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo?

Komunikator dalam penyampaian informasi tentang pemilihan gubernur Jatim tahun 2013 di wilayah RW 01 Bulusidokare Sidoarjo adalah para ketua RT dan juga ketua RW. Para perangkat desa ini memberikan sosialisasi pada warganya bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 diadakan pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin yang amanah dan bijaksana. Para perangkat desa menghimbau agar warganya



turut menggunakan hak suaranya agar memberikan sunghangsi untuk kemajuan provinsi Jawa Timur.

Sebelum adanya sosialisasi secara langsung kepada warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo bahwa adanya pilgub Jatim tahun 2013 pada tanggal 29 Agustus 2013. Petugas PPS meminta RT untuk mendata warganya sebagai daftar calon pemilih tetap pada pilgub Jatim tahun 2013. Setelah semua data di serahkan pada PPS dan di proses oleh KPU tingkat kecamatan, barulah tindakah selanjutnya yang dialkuakan oleh RT dengan mensosialisasikan adanya pilgub Jatim tahun 2103.

Para perangkat desa ini tak hanya mensosialisasikan melalui lisan saja tetapi juga melalui media tulisan yang berupa surat edaran yang berisi undangan agar warga hadir di TPS yang telah ditentukan oleh petugas PPS. Surat edaran tersebut berisika nama warga yang berhak menggunakan hak pilihnya, tempat, tanggal, jam, hari dimana warga bisa berpartisipasi pada pilgub Jatim tahun 2013. Warga juga bisa mendapatkan informasi tentang pilgub Jatim tahun 2013 dari media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Diakui oleh salah satu informan bahwa memang di RW 01 Bulusidokare Sidoarjo kurangnya sosialisasi tentang pilgub, sosialisasi tentang pilgub hanya dilakukan satu kali saja melalui lisan. Sosialisasi yang dilakukan ketua RT itu satu minggu sebelum hari pelaksanaan pemilu, waktu sosialisasi tersebut adalah ketika malam tasyakuran



tanggal 17 Agustus pada saat semua warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo mengikuti kegiatan tersebut.

Pemilihan waktu yang tepat oleh Ketua RT untuk memberikan sosialisasi pada warganya tentang pilgub, karena bisa dipastikan semua warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo akan mengikuti acara malam tasyakuran tanggal 17 Agustus. Acara ini merupakan acara rutin yang dilakukan di setiap tahunnya.

Biasanya yang memberikan sosialisasi tentang pemilu adalah KPU atau panitia PPS, atau tim sukses dari masing-masing calon karena mereka yang lebih tahu prosedur tentang pemilu. Tetapi keadaan yang terjadi dilapangan adalah hanya ketua RT dan ketua RW komunikator dalam sosialisasi tentang pilgub Jatim tahun 2013.

Tugas PPS pada momentum kali ini ialah mempersiapkan pilgub hanya secara teknis saja, yang meliputi menyiapkan seluruh perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi; menyiapkan semua jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara; menyusun jadual dan pemberitahuan pelaksanaan rapat; menyiapkan ruang rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara; melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS; menyusun berita acara dan sertifikat rekapitulasi di tingkat PPS; dan mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon kada dan wakada di tingkat PPS ditempat umum.



Permasalahan tentang sosialisasi kepada warga sepenuhnya diserahkan kepada pengurus RW dan RT setempat. Sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh petugas PPS, karena jika tidak adanya sosialisasi sama sekali dari petugas PPS ataupun pengurus RW dan RT kemungkinan hal yang terjadi adalah warga tidak akan menghadiri event pemilihan gubernur yang berlangsung.

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mampu berpartisipasi secara tanggung jawab.

Individu memperoleh orientasi politik dan pola tingkah laku politiknya melalui proses sosialisasi politik, dan pengalamannya mengenai gejala sosial dan politik melalui berbagai tingkatan dan tipe partisipasi politik. Hal ini merupakan proses sosialisasi yang berkesinambungan, serta merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi partisipasinya dikemudian hari.

Aktor yang berperan dalam proses sosialisasi tentang informasi politik pemilihan Gubernur Jatim tahun 2013 adalah ketua RW bapak H. Soeko Harminto, SH. Ketua RT 01 Bapak Kris Maryono, Ketua RT 02 Ibu Yuliana Doho, Ketua RT 03 Bapak Suwandi, Ketua RT 04 Bapak Rustiyanto, Ketua RT 05 Bapak Ach. Khusen dan Ketua RT 06 Bapak M. Ridwan Hasyim. Orang-orang ini yang mempengaruhi dan



mensosialisasikan kepada warga agar mengikuti pemilihan Gubernur Jatim.

2. Berbicara Masalah Pesan Politik

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana pesan atau informasi yang disampaikan oleh para aktor politik di RW 01 Bulusidokare Sidoarjo?. Maka perlu adanya komunikasi yang efektif, yang bisa mempersusatif para warga.

Pemilihan umum kepala daerah merupakan acara lima tahunan yang diselenggarakan oleh negara guna melaksanakan amanat konstitusi. Media massa maupun layar televisi setiap hari membicarakan hal ini. Adanya pemilu begitu pentingnya bagi kelangsungan demokrasi negara. Dengan adanya pemilihan umum maka setiap orang yang mengikuti perkembangan politik pasti akan membicarakan tentang politik yang sedang berlangsung.

Ketika musim kampanye biasanya para bapak-bapak akan berdiskusi dengan teman-teman kera atau tentangga mereka tentang partai dan calon mana yang akan menang dalam pemilu kepala daerah ini. Diskusi tersebut biasanya berlangsung seru karena mereka akan membela calon yang akan dipilihnya masing-masing.

Pembicaraan politik ini bisa dikatakan musiman, sama seperti halnya dengan berita liga sepak bola yang entah kelas dunia, tingkat asia maupun tingkat nasional di Indonesia. Orang-orang akan membahas pertarungan antara regu A melawan regu B, mereka akan membela regu



yang mereka sukai. Begitu juga dengan pembicaraan politik yang berlangsung ketika adanya pemilihan orang-orang akan membicarakan hal-hal baik tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya.

Tak hanya bapak-bapak tetapi semua golongan dari anak-anak remaja bahkan sampai pada ibu-ibu pengajian, semua akan membicarakan tentang pemilihan umum atau bagaimana profil calon pemimpin yang mereka sukai. Ibu-ibu juga tak jarang membicarakan calon pemimpin yang akan dipilihnya, apalagi dua kali periode pemilihan gubernur kemarin ada salah satu calon pemimpin perempuan.

Di RT 04 RW 01 Bulusidokare diketahui bahwa adanya permainan politik uang, hal ini dilakukan oleh tim sukses guna mendapatkan massa dalam pemilihan umum. Dengan adanya hal ini warga yang mendapat uang dari calon pasti akan termotivasi untuk memilih calon tersebut. Politik uang bisa jadi salah satu strategi dari tim sukses untuk mempersuasi warga agar memilih calon pemimpin yang diwakili oleh partainya.

Sejujurnya politik uang merupakan praktek politik yang fenomenal dan kontroversi. Karena strategi politik uang telah menjadi strategi ampuh yang digunakan untuk memperoleh dukungan massa.

Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan



untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Berbicara masalah politik berarti juga akan membicarakan permasalahan kampanye politik dan proses sosialisasi politik. Biasanya kampanye politik akan dilakukan para calon pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU provinsi, para calon diberikan waktu untuk mempromosikan diri, menjelaskan visi misi dan juga program kerja yang akan dilaksanakan ketika dia terpilih jadi pemimpin. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti debat antar calon di media elektronik atau menampilkan profil secara pribadi melalui media massa.

Pada konteks demokrasi, sejatinya partai politik dan media massa mempunyai peran yang saling melengkapi. Media massa bertindak sebagai kontrol atas realitas sosial politik yang disampaikan kepada masyarakat luas dalam bentuk informasi.

Dalam kegiatan komunikasi politik, fungsi media yang tampak adalah sebagai sumber informasi politik, sebagai fungsi partisipasi, fungsi sosialisasi dari pendidikan politik, fungsi mengembangkan budaya politik, fungsi integritas bangsa. Selain itu media berfungsi sebagai hiburan, dan sosial.

Pesan yang disampaikan berbagai media tentang pilgub Jatim tahun 2013 dan juga profil cagub dan cawagub pada saat kampanye politik, tidak begitu saja diterima secara langsung oleh warga tetapi ada



pengaruh-pengaruh dari orang lain. Baik dari keluarga dekat maupun para perangkat desa yang memberikan sosialisasi tentang pilgub.

Suatu tindakan komunikasi bermula dari si pengirim pesan atau komunikator. Karena itu, kualitas komunikasi sebagian besar tergantung dari keterampilan si pengirim pesan. Ia harus tahu isi pesan yang ingin disampaikan, siapa penerimanya, dan harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Agar mendapatkan umpan balik yang memuaskan dengan adanya saluran komunikasi.

Saluran komunikasi adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Pesan di sini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan seperti gambar, kata, maupun tindakan. Atau bisa pula dengan melakukan kombinasi lambang.

Alat yang dimaksud di sini tidak hanya berbicara sebatas pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk bertukar lambang, namun manusia pun sesungguhnya bisa dijadikan sebagai saluran komunikasi. Secara sederhana saluran komunikasi adalah alat serta sarana yang mempermudah penyampaian pesan.

Pesan yang jelas dan mengena pada sasaran merupakan suatu unsur penting dalam kegiatan komunikasi. Jika pesan tak bisa ditangkap atau tak bisa diterima oleh audiens maka tak akan ada hasil atau timbal balik dari proses komunikasi yang sedang berlangsung.

Penting juga untuk diperhatikan bahwa tanpa adanya komunikasi politik yang efektif, maka aktifitas politik akan kehilangan bentuk. Untuk



itu sumber pesan atau komunikator politik dituntun untuk menyampaikan pesan secara jelas kepada masyarakat. Maka, proses sosialisasi, partisipasi, dan pengrekrutan tergantung pada kegiatan komunikasi.

Minimnya sosialisasi dari RT tentang pilgub Jatim tahun 2103 kepada warganya tak berpengaruh terlalu dalam pada kegiatan pemilihan. Terbukti bahwa warga Bulusidokare Sidoarjo mampu menjalankan event lima tahun sekali yakni pilgub Jatim dengan aman dan terkendali.

Pesan politik yang disampaikan oleh perangkat desa, menggunakan pesan persuasif agar semua orang datang pada waktu pemilihan. Pesan itu yaitu “Mari kita menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan gubernur Jatim, jangan sampai golput agar kita dapat memilih pemimpi yang baik, jujur dan bijaksana”

3. Partisipasi Warga Pada Hari Pemilihan Gubernur Jatim Tahun 2013

Pilkada berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dikatakan memenuhi syarat sebagai pilkada langsung karena adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan memberikan peluang kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Salah satu pertanyaan dari rumusan masalah adalah bagaimana partisipasi warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013?

Para informan ketika ditanyai antara komunikasi politik dan partisipasi politik, mereka menjawab tidak tahu apa itu tentang komunikasi politik. Warga RW 01 lebih mengenal partisipasi politik daripada komunikasi politik. Partisipasi warga ketika berlangsungnya pilgub Jatim tahun 2013 kurang lebih 80% mereka menggunakan hak pilihnya untuk ikut berpartisipasi.

Keikutsertaan warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013 secara langsung ini merupakan salah satu sarana perwujudan partisipasi politik rakyat. Pilgub Jatim tahun 2013 merupakan rangkaian pesta demokrasi masyarakat Indonesia. Melalui pilkada jatim tahun 2013, hasrat politik sekian banyak orang dapat tersalurkan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa semua informan yang didiwawancarai oleh peneliti itu menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur Jatim tahun 2013. Mereka melakukannya dengan berbagai alasan, antara lain ingin memilih pemimpin yang baik, dan ingin menjadi warga negara yang baik juga.

Di TPS pada waktu hari berlangsungnya pemilihan, waktu itu memang terlihat agak sepi hanya beberapa warga yang datang silih berganti untuk menggunakan hak pilihnya. Tetapi hasil akhir pada saat penghitungan suara cukup lumayan memuaskan dari jumlah surat suara

yang sah, ada beberapa surat suara yang tidak sah, dan sedikit yang tidak mempergunakan hak pilihnya atau golput.

Memang pelaksanaan pemilihan di TPS-TPS Bulusidokare Sidoarjo pada saat tanggal 29 Agustus 2013 tak seramai dan semeriah seperti TPS-TPS yang ada dipemberitaan di media elektronik. Perlahan tapi pasti warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo bergantian untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya.

Warga memang tak mengetahui banyak tentang politik dan juga profil para calon tetapi mereka masih antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan ketika para informan ditanyai mengenai apakah mengetahui profil para calon secara jelas. Mereka menjawab hanya sedikit yang mereka ketahui karena mereka tidak begitu mengikuti perkembangan politik.

Meskipun warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo tidak mengetahui profil calon cagub dan cawagub secara jelas, pasti mereka punya catatan evaluasi sendiri mengenai calon yang mereka pilih. Cara mengevaluasin kandidat dengan melihat kredibilitas dan reputasi politik para calon di masa lalu. Setiap keputusan dan perilaku politik akan terekam dalam memori kolektif masyarakat dan inilah yang membentuk persepsi masyarakat mengenai kualitas kandidat.

Masyarakat pasti akan mengingat janji dan harapan yang diberikan para calon cagub dan cawagub pada saat kampanye, dan akan

dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan, apakah terdapat kesesuaian atau tidak.

Satu hal penting bagi para calon cagub dan cawagub adalah mengenai pencitraan diri mereka dimata masyarakat. Hal ini dapat dilihat sampai sejauh mana masyarakat mengetahui profil para calon cagub dan cawagub. Apakah masyarakat mengenal mereka jauh sebelum adanya kampanye politik tentang pilgub Jatim tahun 2013 atau hanya saat pencalonan.

Jika para calon cagub dan cawagub adalah orang-orang yang dikenal oleh masyarakat maka akan timbul keinginan dari masyarakat untuk memenangkan calon yang telah dikenalnya yang sesuai dengan harapannya.

Komunikasi yang dikatakan efektif ketika si komunikator mampu membuat dampak atau umpan balik yang baik sesuai dengan keinginannya dan juga dapat diterimanya pesan dengan baik juga.

Ketidak tahuan warga tentang profil para calon cagub dan cawagub tidak menjadi alasan bagi warga untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Meskipun warga minim pengetahuan tentang profil calon cagub dan cawagub. Warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo sadar bahwa partisipasi mereka dalam pilgub Jatim tahun 2013 ini sangat besar bagi kelangsungan sistem politik atau pemerintahan dalam jangka lima tahun kedepan.

Jika warga atau masyarakat dapat memilih pemimpin yang baik, amanah dan bijaksana, maka kehidupan mereka dalam berbagai sektor dari mulai perekonomian, pendidikan, kesehatan, pembangunan akan sejahtera sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik seperti memberikan suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangkurangnya diperhatikan, dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.

Hasil partisipasi warga RW 01 pada hari pemilihan terlihat dari rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pasangan calon yang tertempel di depan kantor kelurahan. Warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 sebanyak 317 surat suara yang terdiri dari 306 surat suara yang sah dan 11 surat suara yang tidak sah. Kemudian warga yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 sebanyak 359 surat suara, dengan 338 surat suara yang sah dan 21 surat suara yang tidak sah. Dan warga yang menggunakan hak suaranya di TPS 3 sebanyak 355, dari 325 surat suara yang sah dan 30 surat suara yang tidak sah.

TPS 1 dan 3 dimenangkan oleh pasangan Khofifah dan Herman dengan perolehan surat suara sebanyak 139 dan 172 suara. Sedangkan pada TPS 2 dimenangkan oleh pasangan Soekarwo dan Saifullah dengan

perolehan 160 suara. Bisa dikatakan kurang lebih 80% warga RW 01 telah menggunakan hak suaranya pada hari pemilihan gubernur Jatim tahun 2013.

Walaupun pada proses sosialisasi pada warga terdapat beberapa faktor penghambat yang meliputi penyesuaian waktu yang tepat untuk memberikan info tentang adanya pemilihan gubernur, kesibukan dari masing-masing warga dan juga kesadaran berpolitik tidak mengganggu hasil akhir pada partisipasi warga dalam menggunakan hak suaranya.

Bisa jadi partisipasi warga terjadi karena politik uang dari tim sukses Khofifah dan Herman. Sehingga orang-orang yang menerima uang tersebut mempengaruhi warga yang lain untuk memilih Khofifah, karena terlihat dari hasil akhir surat suara di dua TPS dimenangkan oleh pasangan Khofifah dan Herman.

Temuan dalam penelitian ini yakni: *pertama*, yang menjadi komunikator tentang pemilihan gubernur Jatim tahun 2013 di Bulusidokare adalah ketua RW bapak H. Soeko Harminto, SH. Ketua RT 01 Bapak Kris Maryono, Ketua RT 02 Ibu Yuliana Doho, Ketua RT 03 Bapak Suwandi, Ketua RT 04 Bapak Rustiyanto, Ketua RT 05 Bapak Ach. Khusen dan Ketua RT 06 Bapak M. Ridwan Hasyim. *Kedua*, pesan yang disampaikan oleh RT ““Mari kita menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan gubernur Jatim, jangan sampai golput(golongan putih atau tidak memberikan hak suaranya) agar kita dapat memilih pemimpi yang baik, jujur dan bijaksana”, kesimpulan ini didapat dari penyajian

data pada bab tiga. *Ketiga*, partisipasi warga dari sosialisasi yang diberikan perangkat desa ialah partisipasi warga cukup baik dan tinggi, 80% warga RW 01 telah menggunakan hak suaranya pada hari pemilihan gubernur Jatim tahun 2013.

Ketiga temuan itu saling terkait satu sama lain dalam kegiatan proses komunikasi politik, yang dimulai dari bagaimana komunikator menyampaikan atau memilih bahasa yang tepat agar warga mudah memahami, pemilihan waktu ketika penyampaian sosialisai. Pemilihan susunan kalimat pesan yang jelas dan singkat agar langsung mengenai kepada warga dan juga hasil atau dampak dari sosialisasi tersebut yang berupa partisipasi warga yang tinggi.

B. Konfirmasi Temuan Dengan Teori

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan partisipasi rakyat.

Dalam konteks demokrasi, sejatinya partai politik dan media massa mempunyai peran yang saling melengkapi. Media massa bertindak sebagai kontrol atas realitas sosial politik yang disampaikan kepada masyarakat luas dalam bentuk informasi. Sedangkan partai politik menjadi institusi yang

menyerap persoalan masyarakat akar rumput untuk diselesaikan di tingkat pemerintah. Tujuan keduanya berkesinambungan, yakni bagaimana demokrasi dijalankan dan bagaimana kesejahteraan rakyat menjadi prioritas.

Media masa adalah jendela yang memungkinkan kita untuk melihat fenomena yang terjadi melebihi lingkungan dekat kita, penerjemah yang membantu kita membuat perasaan mengalami, pembawa yang menyalurkan informasi, penanda yang memberikan kita instruksi dan petunjuk, dan pembatas yang menghalangi kebenaran.

Masyarakat memandang media hanya sebagai pelengkap informasi dari para pemimpin wilayah setempat atau bisa disebut media sebagai kebutuhan sekunder. Untuk mendapatkan informasi lebih tentang pilgub Jatim tahun 2013. Karena tidak semua informasi yang diberikan oleh media itu selalu benar, bisa saja media melebih-lebihkan atau mengurangi informasi yang mereka terima. Informasi dari Ketua RT dan RW lebih mempunyai pengaruh, karena warga mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi pada perangkat desa.

Sehubungan dengan kenyataan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas seorang manusia, tentu masing-masing orang mempunyai cara sendiri, tujuan apa yang akan didapatkan dan melalui apa atau kepada siapa untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi.

Hal ini sesuai dengan kajian pustaka tentang unsur komunikasi politik yang terdiri dari komunikator politik, pesan politik, saluran atau media

politik, sasaran atau target politik, dan pengaruh atau efek komunikasi politik dari sebuah informasi yang telah diberikan oleh komunikator kepada target politik.

Dengan adanya komunikasi politik akan memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada mengenai perkembangan politik, misal sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara.

Komunikator politik, siapapun dia dan apapun jabatannya, menjalani proses komunikasinya dengan mengalirkan pesan dari struktur formal dan non-formal menuju sasaran (komunikan) yang berada dalam berbagai lapisan masyarakat.

Informasi tentang pilgub Jatim tahun 2014 yang diterima oleh para pemimpin atau RT dan RW Bulusidokare Sidoarjo yang bersumber dari PPS dan juga media massa, kemudian diteruskan kepada warga. Penginformasian ini bertujuan agar warga berpartisipasi secara aktif untuk memeriahkan pesta demokrasi provinsi Jatim.

Ajakan para perangkat desa untuk memeriahkan pesta demokrasi, disambut baik oleh warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo. Warga RW 01 Bulusidokare diwajibkan untuk mengikuti pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah maupun kepala negara. Hal ini berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dikatakan memenuhi syarat sebagai pilkada langsung karena

adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih.

Pada suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosial ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan yang lebih besar dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif. Daripada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan mempunyai status pekerjaan yang rendah.

Orang-orang yang berstatus lebih tinggi khususnya yang pendidikan lebih tinggi, lebih besar kemungkinannya untuk merasa bahwa adalah kewajiban seorang warganegara untuk berpartisipasi dalam politik.

Tingkat pendidikan di RW 01 Bulusidokare Sidoarjo cukup beragam, hal ini tak mempengaruhi tingkat partisipasi warga dalam mengikuti pilgub sangat baik. Meskipun banyak warga yang tidak mempunyai pendidikan atau status pekerjaan yang tinggi.

Analisis teori komunikasi dua tahap dan pengaruh antarpribadi dengan hasil temuan penelitian di lapangan sangat sesuai. Karena informasi mengalir dari media kepada RT setempat kemudian dilanjutkan kepada para warga diajak untuk menggunakan hak pilihnya serta adanya pengaruh dari antarindividu untuk berpartisipasi.

Warga menerima pesan dari media melalui dua proses yang pertama mengenai perhatian dan penerimaan informasi yang sebelum hari pemilihan banyak disiarkan oleh berbagai media. Dan yang kedua berkaitan dengan respon dalam bentuk persetujuan atau penolakan terhadap upaya

mempengaruhi penyampaian informasi untuk disampaikan kepada orang lain.

Setiap individu tidak bersikap sama terhadap pesan media, melainkan memiliki berbagai pesan yang berbeda dalam proses komunikasi. Seperti pemaparan dari para informan bahwa ada yang mendapat informasi dari media tentang profil maupun tentang adanya pemilihan gubernur Jatim tahun 2013.

Peneliti berpendapat bahwa pada pemilihan gubernur Jatim tahun 2013, peran media dan juga pengaruh antarindividu diwilayah RW 01 Bulusidokare sidoarjo berjalan seimbang. Karena media bersaing dengan sumber-sumber gagasan dan kekuasaan yang ada diwilayah setempat.

Tujuan utama dari pemilihan umum secara langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama diabaikan.

Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang lalu merupakan pesta demokrasi tingkat lokal. Seluruh penduduk Jawa Timur yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan turut berpartisipasi dalam pilgub tersebut. Tentunya tak lepas juga dari partisipasi warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo yang juga ikut melaksanakan.

Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2013 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2013–2018. Terdapat empat pasang kandidat yang



bersaing dalam pemilihan umum ini, yaitu pasangan petahana Soekarwo/Saifullah Yusuf yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan 22 partai politik non-parlemen; Bambang Dwi Hartono/Said Abdullah yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Khofifah Indar Parawansa/Herman Surjadi Sumawiredja yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 5 partai politik non-parlemen; serta pasangan Eggi Sudjana/Muhammad Sihat yang maju dari jalur independen.

Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Soekarwo/Saifullah Yusuf yang diusung oleh 10 partai politik parlemen dan 22 partai politik non-parlemen dengan suara sebesar 8.195.816 (47,25%) sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur pada 7 September 2013. Kemenangan tersebut tidak mutlak karena partai yang mengusungnya. Namun partisipasi masyarakat Jawa timur sendiri yang menentukan.

Partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam pilgub Jatim merupakan salah satu faktor penting atas terpilihnya salah satu calon pasangan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018. Dalam pelaksanaannya, keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Dengan demikian, masyarakat tentu berhak ikut serta mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.



Salah satu indikator pilkada langsung yang berkualitas adalah pilkada yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu dikenal dengan hak pilih universal. Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh warga memiliki hak pilih yang sama. Bukanlah suatu kontradiksi bahwa di negara demokrasi seperti Indonesia, hak untuk memilih diatur dengan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi, misal usia minimal, memiliki Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lain.

Sebenarnya sangat diperlukan untuk menjajaki sejauh mana tingkat realitas masyarakat yang ada dalam mensikapi pilgub yang secara langsung mencari sosok pemimpin tertinggi di Propinsi Jawa Timur. Dalam konteks penjajakan tersebut, perlu dibandingkan berapa banyak masyarakat yang optimis terhadap perubahan yang dimulai dari pilgub atau mereka yang pesimis terhadap pilgub Jawa Timur. Di lapangan kita lebih mudah bertemu dengan orang yang pesimis atau minimal tidak mau tahu dengan pilkada ini dibanding jika kita menemukan orang yang optimis perubahan akan bergulir dari pilkada yang terselenggara.

Bagi mereka yang optimis, ia meyakini bahwa pilgub akan menghasilkan banyak perubahan, mulai dari penguasa (gubernur) yang berganti, yang juga akan berimbas pada perubahan tatanan sistem yang ada. Di antara yang optimis juga tumbuh harapan, bahkan tak sedikit yang yakin bahwa pilgub merupakan jalan satu-satunya untuk melakukan perubahan. Berbagai persoalan yang ada selama ini terjadi diharapkan akan ada titik



terang melalui pilgub yang melahirkan seorang gubernur dan wakil gubernur pilihan. Apalagi, pilgub sekarang berbeda dengan periode sebelumnya, terutama karena rakyat memilih langsung pemimpin mereka di Jawa Timur.

Artinya, pilgub sekarang ini dipandang lebih mencerminkan kehendak dan dukungan rakyat. Apa yang dihasilkan benar-benar merupakan aspirasi rakyat. Dengan demikian, pilkada saat ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, mereka yang memiliki pandangan pesimis berasumsi bahwa ada atau tidak ada pilgub, persoalan-persoalan yang ada sudah terlanjur menjadi kompleks, artinya faktor gubernur dan wakil gubernur baru tidak lantas mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat. Asumsi yang kuat muncul terhadap “tidak signifikannya” faktor gubernur akan menjamin berlangsungnya perubahan.

Apalagi ketika para pengikut asumsi pesimis melihat daerah-daerah lain yang telah melangsungkan Pilgub, kemudian mendapatkan sosok gubernur baru yang didukung rakyat juga tidak bisa berbuat banyak. Walau kapasitas pribadi gubernur cukup memadai sekalipun, rakyat kadang tetap saja belum yakin jika gubernur yang mereka pilih punya keberanian menegakkan aturan main yang tegas terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi.

Pilgub di wilayah Bulusidokare Sidoarjo kali ini bersih dari politik uang, karena biasanya pada pemilu-pemilu yang dulu masih sering terjadi

politik uang yang diberikan oleh tim sukses para calon kepada para warga. Bahkan di daerah lain di Sidoarjo masih terdengar adanya politik uang atau bagi-bagi sembako pada warga pada pemilihan gubernur yang berlangsung tanggal 29 Agustus 2013 yang lalu.

Partisipasi warga Bulusidokare pada pemilihan kali ini benar-benar karena atas dasar keinginan pemilih untuk memilih pemimpin yang amanah dan bijaksana agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami masyarakat Jatim. Tanpa adanya embel-embel politik uang ataupun bagi-bagi sembako pada warga yang telah didaftar oleh tim sukses dari cagub dan cawagub.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil.

Modernisasi telah menghasilkan partisipasi politik yang meluas. Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan

kesadaran tersebut sering dijumpai terutama dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan.

Kontribusi partisipasi politik tidak dapat disamaratakan dalam semua sistem politik. Sistem politik yang satu lebih menekankan arti pentingnya partisipasi politik dari yang lain dalam sebuah sistem politik yang berbeda, meskipun perbedaannya tidaklah selalu formal. Dalam masyarakat yang primitif yang politiknya cenderung terintegrasi dengan kegiatan masyarakat, umumnya partisipasinya cenderung tinggi bahkan mungkin sulit untuk dibedakan dari kegiatan lain.

Peneliti melihat salah satu faktor warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo berpartisipasi dalam pemilihan gubernur Jatim dikarenakan adanya modernisasi disegala bidang. Karena melihat letak desa Bulusidokare yang terletak ditengah-tengah kota yang dekat dengan berbagai fasilitas umum yang ada dari perindustrian, tempat perbelanjaan atau disebut mall atau juga pasar tradisional, tempat-tempat pendidikan, dan juga dekat dengan kantor-kantor pemerintahan.

Letak suatu wilayah juga akan berpengaruh pada cara fikir atau cara pandang mengenai sistem politik yang terjadi disekitarnya. Melihat sekarang ini modernisasi diberbagai bidang dikota-kota sudah sangat

menjamur, ditambah dengan adanya media yang salah satu sifatnya untuk mempengaruhi publik secara cepat.

Kemajuan itu berakibat pada partisipasi kaum buruh, pedagang, dan professional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi partisipasi warga Bulusidokare Sidoarjo adalah pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa tentang adanya pilgub Jatim. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu ke seluruh lapisan masyarakat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan rakyat dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Tetapi faktor yang paling penting adalah adanya kesadaran politik warga Bulusidokare Sidoarjo tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu, kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.